

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu maupun badan usaha dengan karakteristik skala usaha, jumlah tenaga kerja, serta kapasitas pengelolaan yang relatif terbatas (Hapsari et al., 2024). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, keberadaan UMKM tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan usaha yang mandiri dan berkelanjutan. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM. UMKM memiliki kontribusi dalam memperkuat ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan ekonomi lokal (Simanjuntak & Putri, 2025).

Dalam perspektif Administrasi Negara, pembangunan tidak hanya dipahami sebagai peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai proses penyelenggaraan pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan dan pelayanan publik. Pemerintah memiliki peran sebagai fasilitator yang menciptakan kondisi agar masyarakat mampu mengembangkan potensi dan berpartisipasi dalam pembangunan. Perubahan paradigma administrasi publik melalui konsep *New Public Service* menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi sebagai aktor yang memiliki peran dalam proses

pembangunan. Pemerintah dituntut untuk membangun kapasitas masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan, dan penguatan partisipasi publik (Denhardt, 2015).

Salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pemerintah dalam pembangunan masyarakat dilakukan melalui kebijakan pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses peningkatan kemampuan masyarakat agar mampu mengakses sumber daya, mengembangkan potensi, serta memiliki kemampuan dalam menentukan dan mengelola kehidupannya secara mandiri. Pemberdayaan bukan hanya pemberian bantuan kepada masyarakat, tetapi proses meningkatkan kapasitas agar masyarakat memiliki kemampuan dalam mengatasi permasalahan dan meningkatkan kesejahteraan (Mardikanto & Soebiato, 2017). Dalam administrasi negara, pemberdayaan menjadi bagian dari kebijakan publik karena berkaitan dengan bagaimana pemerintah melakukan intervensi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat.

Pemberdayaan UMKM menjadi salah satu bentuk kebijakan publik yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat. Pengembangan UMKM tidak hanya berorientasi pada peningkatan aktivitas usaha, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pemberdayaan UMKM bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM membutuhkan proses pendampingan, peningkatan kapasitas, penguatan jaringan, serta dukungan berbagai pihak agar pelaku usaha mampu berkembang secara berkelanjutan.

Dalam praktiknya pelaku UMKM masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengembangkan usaha. Permasalahan yang sering ditemukan meliputi keterbatasan modal, rendahnya kemampuan manajemen usaha, lemahnya jaringan pemasaran, keterbatasan pemanfaatan teknologi digital, serta kurangnya akses terhadap informasi dan pendampingan usaha (Janah et al., 2024). Tantangan digitalisasi juga menjadi hambatan bagi sebagian pelaku UMKM karena masih rendahnya pemahaman terhadap teknologi informasi dan pemasaran digital sehingga menyebabkan keterbatasan dalam menjangkau pasar yang lebih luas (Kamisutara et al., 2025). Maka perlunya pendampingan usaha secara terstruktur melalui komunitas UMKM agar perkembangan usaha dapat berjalan secara berkelanjutan (Basuki et al., 2023).

Perkembangan UMKM di Kota Tanjungpinang masih menghadapi sejumlah permasalahan yang menghambat dalam peningkatan kemandirian ekonomi pelaku usaha. Masih banyak UMKM kesulitan memperoleh pembiayaan formal karena persyaratan yang tidak mudah dipenuhi (Syafara, 2024). Kapasitas manajerial dan literasi digital pelaku usaha masih rendah, terlihat dari terbatasnya kemampuan dalam pemasaran digital, pencatatan keuangan, dan pengelolaan bisnis yang efektif. Akses pasar juga belum optimal, karena tidak semua UMKM mampu memanfaatkan kegiatan promosi atau event daerah seperti festival kopi yang sebenarnya memiliki potensi untuk meningkatkan visibilitas produk sehingga proses menuju kemandirian ekonomi berjalan lambat (Lusiyana, 2024; Prasetya, 2025).

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas menjadi salah satu alternatif dalam meningkatkan kemampuan pelaku UMKM. Komunitas dapat menjadi ruang bagi pelaku usaha untuk memperoleh informasi, berbagi pengalaman, meningkatkan keterampilan, serta membangun jaringan kerja sama. Keberadaan komunitas juga menunjukkan adanya perubahan dalam tata kelola pemerintahan, dimana pembangunan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi melibatkan masyarakat dan aktor lainnya. Hal ini sesuai dengan konsep *collaborative governance* yang menjelaskan bahwa penyelesaian masalah publik membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui proses kerja sama untuk mencapai tujuan bersama (Ansell & Gash, 2008).

Pendekatan kolaboratif (*collaborative governance*) antara pemerintah, komunitas, dan pelaku UMKM terbukti dapat membantu dalam mengatasi hambatan struktural seperti permodalan, dan perizinan (Hanina & Kamaly, 2025), yang dimana menjadi penting bagi peran komunitas UMKM. Meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai program pelatihan, permodalan, dan pendampingan, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa keberlanjutan pemberdayaan UMKM sangat ditentukan oleh kemampuan komunitas lokal dalam menyesuaikan program tersebut dengan kebutuhan dan karakteristik pelaku usaha (Hasibuan et al., 2024).

Komunitas berperan strategis dalam pemberdayaan pelaku UMKM sebagai ruang berbagi informasi, peningkatan kapasitas, dan program pelatihan, pemasaran digital, serta legalisasi usaha guna mendukung keberlanjutan usaha (Chasanah et al., 2025). Proses pemberdayaan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial pelaku usaha, tetapi juga menjadi prasyarat penting dalam

mendorong tercapainya kemandirian ekonomi UMKM agar mampu bertahan dan berkembang secara mandiri dalam menghadapi persaingan pasar.

Kemandirian ekonomi lokal merupakan kemampuan daerah mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa ketergantungan berlebihan pada pihak luar (Setyawan et al., 2025). Kemandirian tercermin dari usaha yang efisien, kepercayaan diri pelaku, serta kesiapan menghadapi risiko jangka Panjang (Febrianty, 2024). Dalam perkembangan ekonomi pada saat ini, kemandirian ekonomi menjadi strategi untuk memperkuat ekonomi mikro agar mampu bertahan menghadapi dinamika pasar (Adlan, 2024).

Kota Tanjungpinang, sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, memainkan peran penting sebagai salah satu pusat perdagangan dan perekonomian di wilayah perbatasan laut. Posisi geografisnya sebagai akses utama Kepulauan Riau memunculkan tantangan tersendiri, terutama dalam hal infrastruktur dan akses ekonomi, yang kemudian berdampak pada dinamika ekonomi lokal dan keberlangsungan UMKM di kota tersebut (Suprihartin & Kurniawan, 2019). Pemberdayaan pelaku UMKM di Tanjungpinang tidak hanya strategis untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga penting untuk pemanfaatan sumber daya lokal yang selama ini belum optimal (Hardiansyah, 2019). Komunitas lokal di Tanjungpinang juga muncul sebagai faktor penting dalam pemberdayaan UMKM.

Salah satu komunitas yang berperan dalam proses tersebut adalah Komunitas Beli Produk Kepulauan Riau (BEPROKEPRI), yang berfungsi sebagai sarana

kerjasama bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan keterampilan usaha, memperluas jaringan, serta memperkuat keberlanjutan ekonomi di tingkat lokal. Keberadaan komunitas beprokepri menjadi menarik untuk dikaji karena menunjukkan adanya keterlibatan aktor masyarakat dalam proses pemberdayaan yang mendukung tujuan pembangunan daerah. Sejauh mana peran komunitas tersebut dalam memberdayakan pelaku UMKM dan mendorong kemandirian ekonomi masih membutuhkan kajian empiris yang lebih mendalam. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas pemberdayaan UMKM melalui program pemerintah, sedangkan kajian mengenai komunitas sebagai aktor pemberdayaan yang menjalankan fungsi pendampingan, penguatan jaringan, dan peningkatan kapasitas masih terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian dengan judul “Pemberdayaan Pelaku UMKM untuk Mendorong Kemandirian Ekonomi melalui Komunitas Beprokepri di Kota Tanjungpinang” penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana proses pemberdayaan dilakukan melalui komunitas, bagaimana peran komunitas dalam meningkatkan kapasitas pelaku UMKM, serta bagaimana hasil pemberdayaan tersebut dalam mendorong kemandirian ekonomi pelaku UMKM. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian Administrasi Negara khususnya mengenai pemberdayaan masyarakat melalui peran komunitas sebagai aktor non-pemerintah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberdayaan pelaku UMKM dalam mendorong kemandirian ekonomi melalui komunitas Beprokepri di Kota Tanjungpinang?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan pelaku UMKM melalui komunitas Beprokepri di Kota Tanjungpinang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah di paparkan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pemberdayaan pelaku UMKM dalam mendorong kemandirian ekonomi melalui komunitas Beprokepri di Kota Tanjungpinang.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan pelaku UMKM melalui komunitas Beprokepri di Kota Tanjungpinang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai konsep pemberdayaan UMKM dengan menempatkan komunitas sebagai aktor penting dalam proses peningkatan kapasitas pelaku usaha kecil dan menengah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai hubungan antara pemberdayaan, peningkatan kapasitas usaha, serta kemandirian ekonomi pelaku UMKM.

Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi pengembangan teori pemberdayaan dan studi UMKM yang menekankan keterkaitan antara peran komunitas, proses pemberdayaan, dan kemandirian ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang menelaah model pemberdayaan berbasis komunitas.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaku UMKM, pemerintah daerah, komunitas Beprokepri, dan masyarakat umum sebagai berikut:

1) Bagi pelaku UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pelaku UMKM dalam meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya komunitas sebagai sarana penguatan kapasitas usaha. Temuan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan kemampuan manajerial, memperluas jejaring usaha, meningkatkan akses informasi dan pembiayaan, serta mendorong kemandirian ekonomi secara berkelanjutan.

2) Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini menawarkan acuan dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan UMKM yang lebih tepat sasaran, terutama dalam menciptakan ekosistem pendukung yang integratif antara komunitas, pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta. Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat membantu menciptakan strategi penguatan UMKM berbasis komunitas yang lebih adaptif dan berkelanjutan di Kota Tanjungpinang.

3) Bagi Komunitas Beprokepri

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi Komunitas Beprokepri dalam menjalankan perannya sebagai agen pemberdayaan pelaku UMKM. Temuan penelitian diharapkan memberikan masukan strategis terkait efektivitas program pendampingan, pola pengorganisasian komunitas, serta mekanisme pemberdayaan, sehingga komunitas dapat meningkatkan kualitas layanan, memperkuat peran kelembagaan, dan memperluas dampak pemberdayaan terhadap anggotanya.

4) Bagi masyarakat umum

Penelitian ini dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mendukung produk lokal serta membuka peluang kerja dan usaha baru.

